

## PELATIHAN MENDESAIN KEBIJAKAN DAN STRATEGI SEKOLAH RAMAH ANAK PADA SATUAN PENDIDIKAN

Novita Tresiana<sup>1</sup>, Noverman Duadji<sup>1</sup>, Rahmah Dianti Putri<sup>2</sup>, Teuku Fahmi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Lampung, Bandar Lampung

<sup>2</sup>Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Lampung, Bandar Lampung

<sup>3</sup>Program Studi Sosiologi, Universitas Lampung, Bandar Lampung

Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145

Penulis Korespondensi: [novitatresiana@yahoo.co.id](mailto:novitatresiana@yahoo.co.id)

### Abstrak

*PKM ini bertujuan meningkatkan wawasan dan pengetahuan akan perlunya membangun kota layak anak melalui sekolah ramah anak dan meningkatkan wawasan dan pengetahuan mendesain kebijakan dan strategi melalui 6 instrumen SRA. Metode yang dipergunakan survei (check list dengan mengisi kuesioner) satuan pendidikan dan metode ceramah serta dialog. Sasaran PKM ini satuan pendidikan (sekolah), murid, orangtua, dan alumni. Lokasi PKM di SMPN 16 Kota Bandar Lampung yang merupakan sekolah model. Kegiatan PKM terdiri dari dua kegiatan, yaitu survei yang dilaksanakan pada bulan Agustus, dan pelatihan yang berlangsung selama dua hari, yaitu tanggal 16-17 Oktober 2017. Kegiatan pelatihan ini dihadiri oleh 53 peserta. Materi dalam pengabdian ini dibagi menjadi 4 hal pokok, yaitu: Mendesain Kebijakan dan Strategi Persiapan SRA, Mendesain Kebijakan dan Strategi Perencanaan SRA, Mendesain Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan SRA dan Mendesain Kebijakan dan Strategi Pelaporan, Monitoring serta Evaluasi SRA. Kegiatan PKM ini berhasil dilaksanakan dan mendapat respon positif dari peserta pelatihan. Hasil dari kegiatan PKM ini didapatnya kata sepakat untuk secepatnya mewujudkan SRA di SMPN 16 Kota Bandar Lampung sebagai salah satu area percepatan untuk menuju kesuksesan kota layak anak yang dicanangkan pemerintah daerah sejak tahun 2012.*

**Kata kunci:** Sekolah Ramah Anak; Kota Layak Anak; Satuan Pendidikan

### 1. Pendahuluan

Pembangunan untuk mewujudkan hak-hak anak berupa perlindungan anak dan tumbuh kembang anak di Indonesia telah memiliki landasan konstitusional dan juga menjadi komitmen internasional. Persoalan khusus anak karena berbagai perlakuan buruk yang menghambat tumbuh kembang anak secara optimal telah menghadirkan konvensi hak Anak, yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1989. Ada 4 prinsip dasar hak anak yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak sebagaimana dilansir Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2015: 3), yaitu (a) prinsip non-diskriminasi, tidak ada pembenaran terhadap diskriminasi atas alasan apapun; (b) prinsip kepentingan terbaik anak; (c) hak atas untuk hidup, kelangsungan hidup, dan

perkembangan; serta (d) penghargaan terhadap pendapat anak .

Komitmen yuridis normatif telah diperjuangkan melalui berbagai undang-undang tentang anak, antara lain; 1) UU Tentang Perlindungan Anak, yakni UU No. 23 Tahun 2002 dan UU perubahannya yakni UU No. 35 Tahun 2014; 2) UU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu UU No. 11 Tahun 2012; 3) Dalam konteks perubahan kewenangan pemerintah daerah, maka perlindungan anak adalah urusan wajib yang telah diserahkan pemerintah pusat kepada pemda sebagaimana termaktub dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, berikut turunannya, yaitu PP No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,

dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 4) secara kelembagaan pemerintah daerah sudah memiliki Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (BP3AKB).

kewenangan pemerintah daerah, maka perlindungan anak adalah urusan wajib yang telah diserahkan pemerintah pusat kepada pmda sebagaimana termaktub dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, berikut turunannya, yaitu PP No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 4) secara kelembagaan pemerintah daerah sudah memiliki Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (BP3AKB).

Khusus untuk Kota Bandar Lampung, pemerintah daerah menetapkan Pengurusutamaan Hak Anak (PUHA) sebagai sebuah perspektif kebijakan perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak ke dalam setiap kegiatan pembangunan, mulai sejak penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai peraturan perundangan-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Untuk mengimplementasi PUHA, maka pemerintah Kota Bandar Lampung pengembangan Kota Layak Anak (KLA), yang merupakan upaya transformasi hak-hak anak kedalam proses pembangunan melalui definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi, dan program yang layak anak

Kontradiktif dengan gambaran di atas, penelitian yang dilakukan oleh Tresiana dan Duadji (2016) mendapati, *Pertama*, kegagalan pemerintah kota dan fakta bahwa Kota Bandar Lampung telah mencanangkan implementasi model KLA tahun 2012 yang lalu, namun pelanggaran terhadap hak-hak anak, persoalan perlindungan dan ruang tumbuh kembang anak masih marak dan muncul dalam bentuk yang semakin bervariasi dan

kompleks; *Kedua*, kegagalan transformasi hak-hak anak dikarenakan isu-isu kebijakan anak belumlah mampu menjadi pusat perhatian dalam keseluruhan kebijakan pembangunan, sehingga bias dalam implementasinya dan birokrasi pemerintah belum responsif anak karena belum adanya kesadaran dari pembuat kebijakan ataupun pimpinan birokrasi akan pentingnya isu anak dalam kebijakan-kebijakan yang disusun.

Masalah utama yang menjadi penyebabnya dikarenakan, model pengelolaan dan perencanaan KLA yang dilakukan oleh pemerintah masih sangat sentralistis, linear (*top down*), hanya menjadikan masyarakat kota dan anak sebagai obyek pembangunan. Model sentralistis tidak lagi sesuai dengan situasi sekarang. Ketidaksesuaian itu selain disebabkan bukan saja karena hasil pembangunan jauh dari apa yang menjadi harapan, namun juga tidak sesuai dengan isu nasional tentang demokrasi dan reformasi. Gerakan reformasi menuntut terjadi devolusi kekuasaan dari pemerintah daerah, dari kelompok elit ke masyarakat sebagai syarat paling esensial bagi berjalannya penyelenggaraan demokrasi pada semua tataran pemerintahan (Tresiana dan Duadji, 2017).

Menganalisis potensi kegagalan dan lambannya perkembangan kota layak anak, maka diperlukan sebuah model gerakan pengembangan kota layak anak yang lebih fokus. Tresiana dan Duadji (2016) merekomendasikan pembangunan sekolah yang ramah anak (SRA) sebagai basis atau instrument daya dorong KLA.

Konsep Sekolah Ramah Anak adalah program untuk mewujudkan kondisi aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup, yang mampu menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, selama anak berada di satuan pendidikan, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran dan pengawasan. Sekolah Ramah Anak bukanlah membangun sekolah baru, namun mengkondisikan sebuah sekolah menjadi nyaman bagi anak, serta memastikan sekolah memenuhi hak anak dan melindunginya, karena sekolah

menjadi rumah kedua bagi anak, setelah rumahnya sendiri.

Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana terutama dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang efektif dan efisien sehingga peserta didik dalam hal ini anak-anak khususnya dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya yang nantinya diharapkan dapat mewujudkan dalam dirinya kekuatan spiritual keagamaan yang tinggi, kecerdasan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan yang akan berguna baik bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, upaya pencapaian proses belajar ini tentunya harus didukung oleh semua pihak. Disinilah urgensi kondisi sekolah atau lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, sehat, ramah dan menyenangkan bagi anak. Dengan kata lain anak-anak yang ada di sekolah dapat terpenuhi haknya. Hal ini penting mengingat delapan jam dalam sehari atau satu per tiga waktu anak berada di sekolah sehingga menjaga melindungi anak selama waktu itu harus menjadi hal yang prioritas dan dilakukan bersama-sama oleh semua unsur yang ada di sekolah mulai dari Kepala Sekolah, Guru, Guru BK, penjaga Sekolah dan lainnya, bahkan sangat perlu adanya kerjasama yang baik dan terarah antara sekolah dengan orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha maupun alumni untuk mendukungnya.

Mengingat pentingnya upaya untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak ini maka Unila perlu membantu mewujudkan kota yang aman melalui SRA, dengan membantu memberi pelatihan menyusun kebijakan dan strategi SRA yang berorientasi pada hasil, yang melibatkan kepedulian, perhatian dan partisipasi anak dan serta stakeholders terkait. Urgensi melibatkan anak dan stakeholders lainnya atau yang sering di sebut komunitas, dikatakan oleh Tresiana dan Duadji (2016) diharapkan anak-anak bisa terbebas dari segala bentuk ancaman, eksploitasi, serta penyalahgunaan anak (*child abuse*) seksual. Selain itu juga untuk mendorong peran serta masyarakat, kesadaran (*awareness*) dari orangtua, alumni, masyarakat untuk mencegah perlakuan yang dapat

merugikan serta membahayakan keberlangsungan anak-anak. Program-program sekolah yang ditujukan bagi anak-anak diharapkan juga melibatkan anak-anak sebagai pelaku sosial dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Sehingga akan muncul rasa menempatkan anak sebagai subjek sosial yang harus dilindungi haknya. Keterlibatan semua pihak inilah ini juga menjadi bagian penting bagi Unila untuk turut serta dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia Indonesia di masa mendatang.

Urgensi perwujudan Kota Layak Anak melalui sekolah ramah anak didasari: Pertama, 1/3 Waktu anak berada di sekolah; Kedua, Keprihatinan orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah karena kondisi anak-anak di sekolah yang rawan kekerasan, keracunan, kecelakaan, kotor, kondisi gedung yang mudah rubuh jika ada bencana dan lain-lain; Ketiga, Masih tingginya angka kekerasan di sekolah; Keempat banyak program-program baik berskala nasional maupun lokal daerah yang sesungguhnya sudah berbasis sekolah dan menunjang terhadap kondisi yang diinginkan dalam sekolah ramah anak. Tim pengabdian menganalisis dan menilai, untuk menuju kota layak anak, maka ada hal yang dapat dilakukan, yaitu Kota harus bersih dari kekerasan terhadap anak, salah satunya di lingkungan sekolah. Karenanya, untuk menuju kesuksesan kota layak anak, maka perlu area percepatan melalui sekolah ramah anak (SRA). Untuk itu, perlu ada upaya agar sekolah di Kota Bandar Lampung dapat menjadi sekolah ramah anak. PKM inimerumuskan masalah: “Bagaimana mendesain sekolah ramah anak agar sesuai dengan kebutuhan anak, tepat program dan dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan sehingga dapat mempercepat perwujudan Kota Bandar Lampung menjadi kota layak anak?”

## 2. Metode PKM

Metode yang digunakan dalam kegiatan PKM ini adalah: 1) survei (check list dengan

mengisi kuesioner) satuan pendidikan dan 2) metode ceramah dan dialog.

Survei check list satuan pendidikan adalah pemetaan kesiapan satuan pendidikan yang dilihat dari: 1) Komitmen tertulis/Kebijakan SRA; 2) proses pembelajaran ramah anak; 3) Pendidik dan tenaga kependidikan yang sadar hak anak; 4) Sarana prasarana ramah anak; 5) Partisipasi anak dan stakeholders terkait. Hasil check list inilah yang nantinya menjadi dasar/level intervensi SRA bagi satuan pendidikan.

Ceramah dibagi dalam 3 sesi. Sesi pertama, adalah penjelasan dari narasumber mengenai pentingnya tahapan mendesain SRA yang meliputi : 1) Persiapan SRA; 2) Perencanaan SRA; 3) Pelaksanaan SRA; dan 4) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan SRA. Sesi kedua, demonstrasi dengan dilakukannya pengkajian SRA melalui metode : 1) identifikasi potensi yang dimiliki sekolah; 2) mengenali dan mengidentifikasi stakeholders SRA; 3) Menyusun tahapan pembentukan SRA; 4) Mengimplementasikan pelaksanaan SRA. Sesi ketiga, diskusi mengenai materi yang telah diberikan dan cara analisis sederhana yang sudah dilakukan. Selain itu, pihak sekolah, murid, orangtua dan siswa serta alumni diberikan modul penuntun praktis mendesain kebijakan dan strategi sekolah ramah anak. Semua kegiatan dilaksanakan di SMPN 16 Kota Bandar Lampung.

Lembaga yang terkait dalam kegiatan PKM ini adalah unsur Perguruan Tinggi, Pemerintah Kota Bandar Lampung, SMPN 16 Kota Bandar Lampung yang membantu memfasilitasi berlangsungnya PKM dan unsur-unsur kelembagaan masyarakat. Dalam melaksanakan pelatihan kepada sekolah, murid, orangtua dan alumni, sangatlah diperlukan kerjasama dari berbagai pihak untuk dapat terlaksananya kegiatan ini dengan baik.

Kegiatan PKM dilaksanakan di SMPN 16 Kota Bandar Lampung. Penetapan lokasi didasari pertimbangan sekolah ditetapkan sebagai sekolah model percontohan di Kota Bandar Lampung. Sekolah ini bukan saja berbasis 8 standar nasional

pendidikan, menerapkan siklus penjaminan mutu pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga budaya mutu tumbuh dan berkembang secara mandiri pada sekolah tersebut. Selain itu juga memiliki karakter iman dan takwa, sopan santum menjadi bagian penting dalam kurikulum dan prilaku keseharian. Sekolah telah menerapkan kurikulum K.13, dengan jumlah siswa laki-laki sebesar 481 dan siswa perempuan sebesar 517 dan memiliki guru 50 orang dan Akreditasi sekolah unggul (A).

Selanjutnya dalam rangka memecahkan masalah yang telah diidentifikasi pada bagian awal, maka Tim PKM akan menyelesaikan dengan kerangka pemecahan masalah sebagai mana ditunjukkan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 1.** Kerangka Pemecahan Masalah

<b>Kondisi Saat ini</b>	<b>Pemberian Perlakuan</b>	<b>Kondisi yang Diharapkan</b>
Sebagian besar Sekolah, murid, orangtu dan, alumni belum mengetahui keterkaitan kota layak anak (KLA) dan sekolah ramah anak (SRA)	Pemberian ceramah dan diskusi untuk menambah pengetahuan	Sekolah, murid, orangtu dan, alumni dapat mengetahui dan memahami
Sebagian besar Sekolah, murid, orangtu dan, alumni Sekolah belum mengetahui cara mendesain langkah langkah pembentukan SRA	Pemberian ceramah dan diskusi untuk menambah pengetahuan	Sekolah, murid, orangtu dan, alumni dapat mengetahui dan memahami
Sebagian besar Sekolah, murid, orangtu dan, alumni belum trampil identifikasi potensi, pengenalan stakeholders, penyusunan tahapan dan implementasi SRA	Pemberian ceramah dan diskusi untuk menambah pengetahuan	Sekolah, murid, orangtu dan, alumni dapat mengetahui dan memahami

Selanjutnya, evaluasi yang akan dilakukan dalam kegiatan PKM ini ada dua jenis, yaitu evaluasi proses dan evaluasi efek. Evaluasi proses ditujukan untuk mengetahui penilaian peserta

terhadap jalannya kegiatan PKM, meliputi penilaian materi, demonstrasi analisis, ketersediaan waktu, media ataupun sarana untuk melaksanakan analisis yang disediakan.

Evaluasi proses dilakukan dengan mengisi kuesioner (angket test). PKM ini melakukan pre-test dan post test. Pre test akan dilakukan sebelum pelatihan dilakukan dalam rangka untuk mengukur wawasan/pemahaman dan penguasaan/ketrampilan yang telah dimiliki para peserta sebelum materi disampaikan oleh tim PKM. Post test akan dilakukan setelah pelatihan selesai dijalankan untuk mengukur sejauhmana keberhasilan pelatihan ini terkait dengan peningkatan pemahaman dan keterampilan/skill para peserta. Post test ini sekaligus menjadi gambaran efektivitas pelatihan yang dilakukan bagi sekolah, siswa, orangtua dan alumni.

### 3. Hasil dan Pembahasan PKM

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dibagi menjadi dua tahapan, yaitu tahap pemetaan dan pemberian materi mengenai sekolah ramah anak. Pemetaan dilakukan dengan menggunakan metode survey (check list) dengan mengisi kuesioner.

Pemetaan ini dilakukan oleh tim peneliti pada bulan Agustus. Hasil survei mendapati ada potensi dari SMPN 16 yang bisa dikembangkan menjadi sekolah ramah anak, yakni: 1) Sudah dimilikinya beberapa kebijakan anti kekerasan terhadap anak berupa larangan dan mekanisme pengaduan kekerasan; 2) ada kebijakan pencegahan peserta didik putus sekolah; 3) Tersedia tenaga konseling/BP3; 4) ada komitmen mewujudkan kawasan bebas rokok dan napza; 5) melindungi hak peserta didik untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing; 6) pemantauan rutin perlindungan anak; 7) SOP Guru yang melakukan kekerasan; 8) Adanya tenaga pendidik dan pendidikan yang telah menguasai hak-hak anak; 9) sarana prasarana yang inovatif; 10) ada partisipasi anak, orang tua dan alumni; 11) UKS yang baik.

Kesemua potensi di atas menjadi daya dukung dapat dikembangkannya satuan pendidikan menjadi sekolah ramah anak sekaligus bisa menjadi *best practice* bagi sekolah ramah anak, khususnya untuk sekolah-sekolah di wilayah Kota Bandar Lampung.

Kegiatan selanjutnya, setelah dilakukan survei adalah pemberian materi dengan metode pelatihan yang diberi judul “Mendesain Kebijakan dan Strategi Sekolah Ramah Anak (SRA) pada Satuan Pendidikan”. Kegiatan pelatihan ini dilakukan selama dua hari dan diisi dengan pemberian materi oleh seluruh anggota tim pengabdian secara bergantian yang diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab mengenai Sekolah Ramah Anak. Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 16-17 Oktober 2017 bertempat di aula SMPN 16 Bandar Lampung, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No 42, Sumur Batu Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung. Kegiatan pelatihan ini diikuti oleh 50 peserta yang merupakan perwakilan dari berbagai elemen sekolah, seperti tenaga pendidik, tenaga kependidikan, siswa, wali murid, komite sekolah, alumni, petugas kantin sekolah dan petugas keamanan sekolah.

Kegiatan pelatihan dibuka pada tanggal 16 Oktober 2017 pada pukul 09.00. Dalam acara pembukaan ketua tim pengabdian Dr. Novita Theresia, S. Sos., M. Si. Dan Kepala Sekolah SMPN 16 Bandar Lampung Purwadi, S. Pd., M.Pd memberikan sambutan. Dalam sambutannya ketua tim peneliti menyampaikan tentang tujuan dari adanya pengabdian ini yaitu dalam rangka mendukung pemerintah daerah untuk percepatan kota Bandar Lampung sebagai kota layak anak, oleh karena itu salah satu untuk bisa menjadi kota layak anak sudah adanya sekolah ramah anak. Selanjutnya, dalam sambutannya kepala sekolah SMPN 16 Bandar Lampung sangat antusias dengan adanya pelatihan ini. Beliau menyatakan bahwa SMPN 16 Bandar Lampung sudah mulai berencana untuk menjadikan sekolah mereka menjadi sekolah ramah anak, sehingga dengan adanya pelatihan ini beliau berharap rencana tersebut dapat lebih cepat terealisasi.

Selanjutnya, setelah acara pembukaan, acara dilanjutkan dengan pemberian pre test kepada seluruh peserta untuk melihat seberapa banyak pemahaman awal mereka terhadap sekolah ramah anak. Pre test ini nantinya akan dibandingkan dengan nilai post test untuk melihat seberapa besar materi pelatihan dapat dipahami oleh seluruh peserta pelatihan. Setelah dilakukan pre test selanjutnya adalah penyampaian materi. Materi dalam pengabdian ini dibagi menjadi 4 hal pokok yang berkaitan dengan mendesain kebijakan dan strategi sekolah ramah anak, berikut ini materi yang telah disampaikan oleh tim pengabdian.

**Tabel 2.** Materi dan Pemateri Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Kegiatan	Pemateri
1.	Materi I “Mendesain Kebijakan dan Strategi Persiapan SRA”	Dr. Novita Tresiana, S. Sos., M. Si.
2.	Materi II “Mendesain Kebijakan dan Strategi Perencanaan SRA	Rahmah Dianti Putri, S. E., M. Pd.
3.	Materi III “Mendesain Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan SRA”	Teuku Fahmi, S. Sos., M. Krim.
4.	Materi IV “Mendesain Kebijakan dan Strategi Pelaporan, Monitoring serta Evaluasi SRA”	Dr. Noverman Duadji, M. Si.

Materi pertama disampaikan oleh ketua tim pengabdian, Dr. Novita Tresiana, S. Sos., M. Pd. dengan judul materi “Mendesain Kebijakan dan Strategi Persiapan Sekolah Ramah Anak (SRA)” Penyampaian materi dilakukan selama 2 jam, yaitu dari pukul 10.00-12.00 WIB. Dalam materi tersebut disampaikan definisi dan ruang lingkup sekolah ramah anak, tujuannya agar peserta memahami seperti apa sekolah ramah anak, dan bedanya antara sekolah biasa dengan sekolah ramah anak. Selain itu, dijelaskan juga langkah-langkah untuk sebuah sekolah menjadi sekolah ramah anak.

Sesi kedua pelatihan pada hari pertama diisi oleh Rahmah Dianti Putri, S.E., M. Pd. dengan judul materi “Mendesain Kebijakan dan Strategi Perencanaan SRA”. Dalam sesi kedua ini dijelaskan bagaimana sekolah melihat potensi-potensi yang dimilikinya untuk dapat dikembangkan menjadi sekolah ramah anak, dalam sesi kedua ini ditegaskan bahwa Sekolah Ramah Anak bukanlah membangun sekolah baru, namun mengkondisikan sebuah sekolah menjadi nyaman bagi anak, serta memastikan sekolah memenuhi hak anak dan melindunginya, karena sekolah menjadi rumah kedua bagi anak, setelah rumahnya sendiri. Pelatihan hari pertama ini ditutup dengan diskusi dan tanya jawab pada akhir sesi. Pelatihan hari pertama ini berakhir pada pukul 16.00 WIB.

Pada hari kedua, pelatihan dimulai pukul 09.00 WIB. Penyampaian materi sesi satu oleh Teuku Fahmi, S. Sos., M. Krim. Dengan judul “Mendesain Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan SRA” dan sesi kedua oleh Dr. Noverman Duadji, M., Si. Dengan judul materi “Mendesain Kebijakan dan Strategi Pelaporan, Monitoring serta Evaluasi SRA”.

Pada sesi pertama hari kedua dijelaskan tentang pelaksanaan sekolah ramah anak yang dimulai dari deklarasi sekolah ramah anak, pembuatan kebijakan-kebijakan tertulis tentang sekolah ramah anak, dan pengembangan serta perbaikan-perbaikan fasilitas sekolah untuk bisa menjadi aman bagi siswa. Pada sesi kedua ini juga ditampilkan gambar-gambar contoh pelaksanaan sekolah ramah anak.

Pada sesi kedua hari kedua, pemateri menjelaskan tentang bagaimana pelaporan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sekolah ramah anak. Selain itu, pada sesi ini juga dijelaskan tentang prosedur pengaduan apabila terjadi tindak kekerasan pada anak di sekolah atau terjadi kecelakaan pada anak ketika berada di sekolah.

Pelatihan hari kedua ini diakhiri dengan sesi tanya jawab dan diskusi seperti hari pertama, serta dilanjutkan dengan post test kepada seluruh peserta. Pelatihan hari kedua ini berakhir pada pukul 16.00 WIB.

Secara keseluruhan kegiatan PKM ini dapat dikatakan berhasil. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil survei yang dilakukan. Hasil survei menunjukkan bahwa sudah ada beberapa kebijakan berkaitan dengan sekolah ramah anak seperti anti kekerasan terhadap anak, pembiasaan interaksi antara pendidik dan peserta didik yang baik dan menyenangkan, pembelajaran di kelas sudah menggunakan model PAIKEM, sudah adanya partisipasi atau keterlibatan siswa dalam pengambilan keputusan program-program sekolah dan sudah tersedianya fasilitas pendukung seperti toilet yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, fasilitas olahraga yang memadai dan lain sebagainya.

Berdasarkan dari definisi Sekolah Ramah Anak sebagaimana dikemukakan Kementerian PPPA RI (2015), penerapan Sekolah Ramah Anak (SRA) dilaksanakan dengan merujuk 6 (enam) komponen penting yaitu : 1) Kebijakan SRA; 2) Pelaksanaan Proses Pembelajaran yang ramah anak; 3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak-Hak Anak dan SRA; 4) Sarana dan Prasarana SRA ; 5) Partisipasi Anak; 6) Partisipasi Orang Tua, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan Lainnya, dan Alumni. Hal-hal tersebut hampir seluruhnya ditemukan pada survei yang dilakukan dalam pengabdian ini sehingga jelas terlihat bahwa sekolah SMPN 16 Kota Bandar Lampung ini sudah siap mewujudkan sekolah ramah anak.

Kemudian, keberhasilan PKM ini yang lain terlihat pada kegiatan pelatihan. Kegiatan pelatihan yang berjudul judul “Mendesain Kebijakan dan Strategi Sekolah Ramah Anak (SRA) pada Satuan Pendidikan” berjalan dengan baik dan mendapat respon positif dari seluruh peserta, hal ini dapat dilihat dari antusiasnya peserta dalam mengikuti pelatihan dan dalam kegiatan diskusi.

Sebelum pelatihan dimulai tim mengadakan pre test dan setelah pelatihan selesai tim pengabdian juga melakukan post test kepada peserta pelatihan, hasil post test tersebut memperlihatkan adanya peningkatan nilai pre test dan nilai post tes yang sangat tinggi, peningkatan

nilai antara pre test dan post test ini menunjukkan bahwa pelatihan ini efektif untuk memberi pemahaman kepada seluruh peserta tentang sekolah ramah anak dan pelaksanaannya.

Selanjutnya, seluruh peserta pelatihan juga telah sepakat untuk secepatnya akan menerapkan program-program sekolah ramah anak dalam lingkungan SMPN 16 Bandar Lampung. Selanjutnya, kepala sekolah SMPN 16 Bandar Lampung meminta kepada tim pengabdian untuk mengadakan tindakan lanjut berupa pendampingan kepada sekolahnya dalam rangka pelaksanaan program sekolah ramah anak ini.

Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terlihat bahwa SMPN 16 Bandar Lampung sudah sangat siap untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak. Lebih lanjut pengabdian masyarakat ini direncanakan dapat berkelanjutan dengan pendampingan ke sekolah SMPN 16 Bandar Lampung untuk pendeklarasian dan pelaksanaan program-program sekolah anak. Sehingga target selanjutnya adalah sekolah SMPN 16 Kota Bandar Lampung ini dapat menjadi salah satu sekolah ramah anak di kota Bandar Lampung, dan menjadi referensi sekolah-sekolah lainnya di Kota Bandar Lampung dalam mewujudkan sekolah ramah anak. Selanjutnya tim peneliti berkomitmen Sekolah Ramah Anak di Bandar Lampung dapat berkembang ke sekolah lainnya sebagai salah satu area percepatan untuk menuju kesuksesan kota layak anak yang dicanangkan pemerintah daerah sejak tahun 2012.

#### **4. Kesimpulan:**

Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilakukan ini dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Telah ditemukan potensi-potensi yang mendukung terwujudnya Sekolah Ramah Anak di SMPN 16 Kota Bandar Lampung.
2. Pelatihan yang diberikan oleh tim pengabdian dapat dipahami oleh seluruh peserta pelatihan.

3. Pelatihan yang diberikan oleh tim pengabdian sangat bermanfaat untuk pihak sekolah dalam rangka mewujudkan Sekolah Ramah Anak.
4. Pihak sekolah yaitu SMPN 16 Kota Bandar Lampung telah sepakat untuk segera mewujudkan Sekolah Ramah Anak di sekolahnya.

Vocctoria, Johson dkk. (2001). Anak-anak Membangun Kesadaran Kritis. Read Book, TDH dan Plan International. Jakarta.

### Ucapan Terima Kasih

Terima kasih disampaikan kepada LPPM Unila yang telah mendanai pengabdian ini, sehingga pengabdian ini dapat berjalan lancar dan tanpa kendala. Terima kasih juga disampaikan kepada pihak sekolah SMPN 16 Kota Bandar Lampung yang telah menyediakan tempat dan fasilitas lainnya dalam rangka kegiatan pengabdian ini. Terakhir, terima kasih juga disampaikan kepada seluruh anggota tim dan mahasiswa yang telah banyak membantu terkait pengabdian ini.

### Daftar Pustaka

- Duadji, Noverman dan Tresiana, Novita. (2016). Kajian Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak : Model Kebijakan Pembangunan Kota Layak Anak berbasis Collaborative Governance. Laporan Penelitian Hibah Institusi Unila. Tidak Dipublikasikan. Bandar Lampung
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. (2015). Juknis Sekolah Ramah Anak. Jakarta
- Tresiana, Novita. (2016). Kajian Wanita, Anak dan Gender di Propinsi Lampung: Sustainable Development Goals dan Implementasinya Dalam Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak, Kebijakan Pendidikan, Kualitas Kesehatan Dan Kerentanan Ekonomi Perempuan. Laporan Penelitian Hibah Institusi Unila. Tidak Dipublikasikan. Bandar Lampung
- Tresiana, Novita dan Duadji, Noverman. (2017) Model Pengembangan Pengelolaan Pariwisata Berbasis Komunitas. Draft Laporan penelitian. Tidak Dipublikasikan.